

PETUGAS BELUM TEMUKAN BAHAN PANGAN BERBAHAYA

Pengawasan Keamanan Pangan Semakin Intensif

YOGYA (KR) - Kegiatan pengawasan keamanan pangan di wilayah Kota Yogya kini semakin diintensifkan. Terutama menyasar pasar rakyat yang memperjualbelikan bahan pangan maupun di pasar tiban Ramadan yang merebak di berbagai wilayah.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogya Eko Rahmadi, menyebut pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan maupun Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BB-POM) Yogyakarta dalam melakukan pengawasan. "Sudah ada jadwal untuk mengambil sampel bahan pangan di sejumlah pasar tradisional. Dua hari kemarin kami sudah ke Pasar Sentul dan Pasar Kranggan. Besok bergantian ke lokasi lain," jelasnya, Jumat (22/3).

Dalam kunjungan ke sejumlah pasar, petugas mengambil sampel bahan pangan maupun makanan yang diperjual belikan oleh pedagang. Di antaranya bakso, mi basah berwarna

kuning, teri, agar-agar berwarna merah dan kerupuk kering. Bahan pangan itu kerap menjadi olahan untuk menu takjil di pasar tiban. Dari sampel yang diambil lantas diuji laboratorium. Hasilnya, petugas belum menemukan kandungan unsur pangan yang berbahaya bagi manusia. Bahan makanan berbahaya yang diawasi seperti borak, formalin, kandungan babi, pewarna metilen yellow, ataupun pewarna rhodamine.

"Temuan kami semua bahan yang kami uji sampelnya, tidak ada kandungan yang dilarang. Pengujian dilakukan di Dinas Kesehatan dengan alat yang sudah ada. Kemudian memang sampel yang diambil di beberapa pasar ini

sama. Sehingga kami bisa melihat bahan pangan yang digunakan apakah sudah sesuai dengan bahan mutu pangan," tandasnya.

Dirinya berharap selama proses pengawasan pangan berakhir pada April mendatang pihaknya tidak menemukan kandungan bahan makanan yang tidak sepatutnya beredar. Eko juga berharap para pelaku industri olahan pangan meski skala rumah tangga tetap mengajukan sertifikasi ke Dinas Kesehatan. Legalitas sangat dibutuhkan guna menjamin keamanan pangan.

Sementara Kepala BB-POM Yogyakarta Bagus Heru Purnomo, menjelaskan intensifikasi pengawasan yang dilakukannya akan berlangsung hingga 18 April 2024 atau usah lebaran. Targetnya ialah mata rantai peredaran pangan mulai dari distributor, pasar modern, toko retail, pasar tradisional, penjual parcel hingga penjual takjil. "Target kami

ialah 40 lokasi dengan cakupan di seluruh DIY. Dua minggu ini pengawasan sering dilakukan di Bantul dan Kulonprogo. Tetapi minggu depan kami sudah fokus di Kota Yogya," jelasnya.

Sasaran lokasi di Kota Yogya yang mendapat perhatian BB-POM ialah Kotagede. Pada pagi hari aktivitas pasar di sana cukup ramai. Begitu pula sore hari hingga menjelang waktu berbuka kondisinya juga masih cukup ramai.

Target yang diawasi bukan hanya bahan makanan melainkan juga produk rusak, kadaluarsa dan tanpa ijin eddar. Sejauh ini pihaknya juga belum menemukan kandungan bahan makanan yang membahayakan. "Dalam melakukan pengawasan kami juga membawa alat uji cepat. Jadi begitu sampel diambil, saat itu juga langsung diuji dan hasilnya bisa diketahui. Sementara ini hasil pengujian semuanya memenuhi syarat makan," katanya. (Dhi)-f



KR-Subchan Mustafa

Menu angringan menjadi salah satu alternatif buka puasa bagi masyarakat. Tampak salah satu angringan di Jalan Margo Utomo Yogyakarta yang menyediakan aneka jenis jajanan dan bermacam-macam nasi bungkus.

PEMKOT BUKA POSKO PENGADUAN DI KOMPLEK BALAIKOTA

Pekerja Satu Bulan Sudah Berhak Peroleh THR

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya kembali menegaskan kewajiban perusahaan dalam membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi karyawannya. Termasuk bagi pekerja yang sudah bekerja selama satu bulan pun wajib diberikan haknya atas THR tersebut.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, mengatakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) sudah membuka posko pengaduan THR di kompleks Balaikota Yogya. "Ini harus menjadi perhatian kita bersama bahwa semua pekerja berhak atas THR Keagamaan. Bagi yang sudah bekerja setahun lebih maka besaran minimal satu kali gaji. Sedangkan yang baru kerja satu bulan hingga kurang dari setahun juga berhak namun besaran proporsional," katanya, Jumat (22/3).

Pemberian THR Keagamaan diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan. Menteri Ketenagakerjaan juga me-

nerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04-III/2024 terkait petunjuk pelaksanaan pemberian THR. Pemberian THR harus sudah dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.

Singgih menambahkan, pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu, juga berhak atas THR. Oleh karena itu semua pekerja tanpa memandang status dan durasi bekerjanya, wajib diberikan THR oleh pihak pemberi kerja. "Masyarakat pekerja tidak perlu khawatir. Jika ada persoalan terkait THR, silakan sampaikan aduan melalui posko atau kanal online. Kami akan menjembatani masalah itu," tandasnya.

Sementara Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogya Maryustion Tonang, menjelaskan posko pengaduan THR akan memberikan pelayanan hingga 3 April 2024 mendatang. Papan informasi berupa spanduk sudah terpasang jelas di Kantor Dinsosnakertrans Kota Yogya kompleks Balaikota. Aduan dan konsultasi juga

bisa dilakukan melalui email ke bidangkhi@gmail.com. Termasuk melalui nomor WA antara lain di 087836674992 dan 089668650083. Posko itu juga sudah terintegrasi melalui laman https://poskothr.kemnaker.go.id.

Maryustion mengatakan, secara umum pelaksanaan THR tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Mengingat dasar hukum terkait pembayaran THR tahun 2024 masih sama dengan tahun lalu. "Saya kira tidak ada hal yang prinsip karena dasar hukumnya sama dengan tahun lalu. Misalnya pembayaran THR tidak boleh dicicil dan dibayarkan maksimal H-tujuh sebelum hari raya," terangnya.

Menurutnya, pada tahun lalu ada sekitar 30 aduan dan konsultasi yang masuk di Posko THR Dinsosnakertrans Kota Yogya. Aduan tersebut juga dapat terselesaikan. Pihaknya berharap perusahaan dapat membayarkan THR sesuai ketentuan. Manajemen perusahaan dan serikat pekerja diharapkan bisa saling berembus apabila ada permasalahan terkait THR. (Dhi)-f

Pemda DIY Larang ASN Gunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik

YOGYA (KR) - Pemda DIY melarang aparat sipil negara (ASN) di lingkungannya menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, seperti mudik saat Lebaran. Karena sejak dahulu penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi seperti mudik atau pulang kampung memang tidak diperbolehkan. Karena ketentuan dan aturannya sudah jelas, pihak-pihak terkait diminta untuk mentaati.

"Kami mengimbau agar dalam momentum lebaran nanti ASN tidak menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik. Karena sejak dulu memang tidak diperbolehkan. Bahkan dalam waktu dekat kami

akan membuat semacam surat edaran berkaitan dengan hal itu," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono di Yogyakarta, Jumat (22/3).

Menurut Beny, apabila nantinya ditemukan ada ASN di lingkungan Pemda DIY yang menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik Lebaran, akan dikenakan sanksi dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu dikarenakan aturannya sudah jelas, jadi harus ditaati. Termasuk seandainya ada oknum ASN yang mengelabuinya dan mengganti plat kendaraan dinas menjadi warna biasa. Adapun untuk pengawasannya, pihaknya meminta pimpinan

OPD dan pihak terkait lainnya lebih proaktif.

"Kalau ada yang terbukti melakukan pelanggaran sudah ada salurannya sendiri. Jadi akan kami ingatkan lagi dan buat surat edaran kalau mendekati lebaran. Karena penggunaan kendaraan dinas hanya diperbolehkan untuk mendukung kerja-kerja yang berkaitan dengan kedinasan," ungkapnya.

Aturan berkaitan dengan itu sudah ada dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/87/M. PAN/8/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja. (Ria)-f

SINERGI PEMKOT DAN BAZNAS KOTA YOGYA

Warga Berkebutuhan Khusus Peroleh Alat Bantu

YOGYA (KR) - Warga dengan kebutuhan khusus menjadi sasaran bantuan alat bantu untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Program itu merupakan hasil sinergi antara Pemkot dengan Baznas Kota Yogya. Pada Jumat (22/3) kemarin giliran dua warga berkebutuhan khusus di Kemantren Kotagede yang memperoleh alat bantu. Bantuan diserahkan oleh Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo didampingi Ketua Baznas Kota Yogya Syamsul Azhari dan jajaran Kemantren Kotagede.

Alat bantu berupa kaki palsu diberikan kepada

Sigit Prasetyo serta alat bantu berjalan atau walker cerebral palsy sepatu koreksi bagi Kenzo Andromeda Merkuri. "Ini adalah bentuk perhatian dan komitmen dari Pemkot kepada warga Yogya yang memang membutuhkan bantuan," kata Singgih usai menyerahkan alat bantu di Gedongan Purbayan, Kotagede, Jumat (22/3).

Pihaknya berharap dengan pemberian alat bantu itu dapat membantu aktivitas dan menambah semangat warga yang memiliki kebutuhan khusus. Menurutnya warga berkebutuhan khusus seperti Sigit dan Kenzo sangat

membutuhkan alat bantu untuk bisa beraktivitas seperti berjalan dan lebih mandiri.

Singgih berpesan kepada pengampu wilayah seperti mantri pamong praja, lurah, RT dan RW untuk melihat kondisi wilayahnya kalau masih ada masyarakat kota yang membutuhkan alat bantu agar diinformasikan. Sebisa mungkin Pemkot akan mengupayakan bantuan karena salurannya cukup banyak seperti sinergitas bersama Baznas.

Ketua Baznas Kota Yogya Syamsul Azhari, menyebut selama dua bulan ini sudah memberikan

bantuan alat bantu kepada enam warga berkebutuhan khusus. Antara lain berupa kursi roda, tangan palsu dan kaki palsu bagi warga berkebutuhan khusus yang tersebar di wilayah Kota Yogya. (Dhi)-f

Forpi Dukong Pemkot Tegakkan Aturan Jam Malam Anak

YOGYA (KR) - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, mendukung langkah Pemkot Yogyakarta yang akan menegaskan aturan terkait jam malam anak. Pengaturan itu khususnya pada malam hari, diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 49/2022. Dalam Perwal disebutkan anak di bawah umur dilarang keluar pada pukul 22.00 WIB- 04.00 WIB. Dikecualikan diberikan kepada anak yang mengikuti kegiatan sekolah, sosial keagamaan, didampingi orang tua atau keadaan darurat.

Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba menuturkan, aturan ini dibuat untuk menghindari anak di bawah umur terlibat dalam tindak pidana kekerasan jalanan atau klitih. "Kami berharap dengan Perwal 49/2022 yang berlaku sejak tahun 2022 ini efektif untuk menekan kejahatan

jalanan (klitih) selama Bulan Ramadan. Titik yang berpotensi dijadikan tempat berkumpulnya anak pada malam hingga dini hari juga perlu diawasi," tutur Kamba, Jumat (22/3).

Diungkapkan, penerapan jam malam menjadi salah satu upaya dalam

mencegah aksi kekerasan jalanan yang kerap melibatkan anak di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar. "Petugas harus melakukan pengawasan dengan optimal supaya implementasi aturan ini betul-betul efektif di wilayah Kota Yogyakarta," ungkap Kamba. (*-1)-f

PT. PRIMISSIMA (Persero)				
Jl. Raya Magelang Km.15 Medari Sleman Yogyakarta 5515, Indonesia Telp. (0274) 868 408, Fax. (0274) 868 417 e-mail : sekretaris@primissima.co.id - marketing@primissima.co.id				
PENGUMUMAN PENJUALAN ASET TETAP				
Obyek atau Aset yang Dijual berupa :				
DATA MESIN SPINNING PABRIK III (Milik Primissima)				
NO	MESIN	MERK dan TYPE	TAHUN PEMBUATAN	JUMLAH (UNIT)
LOT 1				
1	Uniflock	Rieter A, 1/1a	1982	1
2	Rotopic	Rieter B, 2/3	1982	1
3	Mixing bale Opener	Rieter B, 2/4 R	1982	1
4	Mono Cylinder	Rieter B, 4/1	1982	2
5	Blending Opener	Rieter B 3/3 R	1982	2
6	ERM	Rieter B 5/5	1982	2
7	Flock Feeder	Rieter A 7/2	1982	2
8	Carding	Rieter C 1/2	1975	1
		Rieter C 1/3	1982	8
9	Drawing Chery Harra	Toyoda DX 500	1990	2
10	Flyer	Rieter F 1/1 a	1982	1
11	Ring Spinning	Rieter G 5/1	1982	24
12	Winding	Savio Espero H (60 drum)	1990	2
13	Fiber Depositing Plant	LUWA	1982	1
LOT 2				
1	Drawing	Rieter RSB D 35	2006	1
2	Drawing	Rieter RSB D 40	2006	1

Waktu melihat barang :
Hari / Tanggal / Pukul : Senin s/d Kamis / 25 - 28 Maret 2024 / Jam 07.30 s/d 15.30 WIB
Lokasi : PT. Primissima, Jl. Raya Magelang KM 15 Medari, Sleman, Yogyakarta

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

PENYELENGGARAAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ONLINE Sarana Memadai, Saatnya Genjot Sumber Daya

YOGYA (KR) - Jajaran Komisi A DPRD Kota Yogya tengah melakukan kajian terkait penyelenggaraan pelayanan publik berbasis online. Dari hasil kajian sementara, terdapat beberapa catatan yang perlu disampaikan ke eksekutif. Salah satunya ialah kegiatan untuk menggenjot sumber daya manusia baik jajaran pegawai maupun masyarakat umum.

Pimpinan Komisi A DPRD Kota Yogya Marwoto Hadi, menilai layanan publik berbasis online sudah menjadi kebutuhan pada era digital saat ini. "Ada banyak aspek yang sudah kami petakan. Salah satu yang cukup penting ialah pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan. Tidak hanya pegawai yang terlibat dalam operasional melainkan juga masyarakat pengguna," tandasnya.

Bagi operator, kesiapan dalam mengoperasikan layanan publik berbasis online menjadi hal yang mutlak. Pahalanya hal tersebut akan saling berkaitan dengan keberlangsungan layanan serta tingkat responsibilitas. Sedangkan dukungan terhadap masyarakat juga menjadi hal penting agar layanan publik online bisa dimanfaatkan secara optimal.

Anggota dewan dari Fraksi Gerindra ini juga menilai, layanan online memiliki ketergantungan dari aspek ketersediaan infrastruktur dan keterjangkauan akses. Sarana dan fa-

Marwoto Hadi
Pimpinan Komisi A



KR-Istimewa

silitas di Kota Yogya sudah cukup terakomodir. Begitu pula keterjangkauan lantaran tidak ada ruang yang tidak terjangkau oleh jaringan internet atau blankspot. Hanya, akses internet gratis perlu diperluas hingga tingkat RT. "Pemkot harus memastikan pula sistem yang dibangun untuk layanan online ini andal. Ini akan berkaitan erat dengan jaminan atau memastikan kecepatan akses dan efisiensi. Bisa jadi sistem sudah andal namun ketika akan diakses ternyata lemot, itu juga bisa jadi persoalan," jelasnya.

Selain itu keamanan data turut menjadi perhatian serius agar mampu dijamin dengan baik. Sistem yang baik memiliki tingkat proteksi yang tinggi terhadap serangan siber. Dengan begitu data pengguna wajib diamankan agar tidak disalahgunakan.

Di samping itu, Pemkot dalam hal ini operator harus responsif terhadap umpan balik. Jangan sampai permohonan atau aduan yang sudah masuk namun baru direspons tiga hari kemudian. Ketika sudah berkomitmen dalam menggulirkan layanan publik berbasis online maka ada prosedur durasi tindak lanjut. Ketika ada pengajuan maka saat itu juga langsung direpson dan diberikan kepastian waktu terhadap prosesnya. "Masyarakat atau pengguna juga bisa mengecek sewaktu-waktu tahapan yang sudah berjalan sampai di mana. Makanya sangat penting ada dukungan pelatihan dan program bagi operator maupun masyarakat. Jangan sampai sistem sudah siap tapi masyarakatnya justru tidak siap," katanya.

Marwoto pun berharap, kelak seluruh layanan bisa dipusatkan di kelurahan. Sehingga aparat di kelurahan hendaknya diperkuat dengan pegawai yang familiar dengan digital. Warga tidak perlu lagi harus jauh-jauh menuju balai kota karena seluruh layanan bisa diakses melalui kelurahan dan sistem online. (Dhi)-f